



DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

# RENCANA AKSI 2019

---

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

## KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM KLHK) tahun 2019 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Aksi ini memuat perencanaan dan prognosis per Triwulan di Tahun 2019 kedepan lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam melaksanakan berbagai tugas yang di embankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah TA 2019 dan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2019, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah di tetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efesien.

Dengan Rencana Aksi ini diharapkan adanya optimalisasi peran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam peningkatan efesiesian, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun tahun selanjutnya.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,



Rasio Ridho Sani

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Rencana Aksi (Renaksi) Tahunan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM LHK) Tahun 2019 adalah dokumen rencana aksi tahunan kelima yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh GAKKUM LHK terutama pencapaian Sasaran Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia. Bagi GAKKUM LHK yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas nasional pada tahun 2019, maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas nasional yang telah ditetapkan.

### **I.1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Rencana Aksi Penetapan Kinerja TA 2019 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## I.II LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

- Undang Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/PHLHK-SETDIT/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015- 2019;
- Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.4/PHLHK/SET/SET.1/9/2018 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019;

## BAB II

### RENCANA AKSI

Sesuai dengan perjanjian kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2019 telah disampaikan bahwa kinerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah tersedianya instrumen dan regulasi untuk mendukung Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dapat dilihat dari sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tabel berikut:

Rencana Aksi Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Sasaran Program	Output Program	Indikator Kinerja Program	Target 2019
Seluruh Pemegang Izin Lingkungan Menaati Peraturan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	650 Izin
Meningkatnya Hak- Hak Negara atas Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup	Penyelesaian kasus sampai P21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan peredaran ilegal TSL	Jumlah penyelesaian kasus sampai P21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan peredaran ilegal TSL	125 Kasus P-21
Meningkatkan kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan	Kawasan Hutan (termasuk Kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan	Seluruh Unit Kawasan Hutan (termasuk Kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan	2.675.000 Hektar

Dari sasaran program tersebut terdapat perubahan satuan output dari semula IKP 1 output dalam satuan Persentase menjadi Satuan Izin disesuaikan atas arahan DJA, Kementerian Keuangan di dalam Penyusunan RKA K/L TA 2019. Oleh karena itu maka disusunlah rencana aksi kegiatan yang nantinya akan menunjang pencapaian sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun kegiatan lingkup Eselon II di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2019
Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 34 Provinsi	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi	2.669.000
	Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	6.000
	Penyediaan Sarana Prasarana SPORC	6 Lokasi
Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Pendaftaran, Penyusunan Gugatan, Upaya Hukum dan Pelaksanaan Putusan Gugatan Perdata Melalui Pengadilan	7 Gugatan
	Penyelesaian Sengketa LH di DAS Citarum;	3 Gugatan
	Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan	20 Perkara
Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani	1200 Pengaduan
	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	650 Izin
	Penerapan Sanksi Administrasi	100 Sanksi
	Penyediaan Sarana Prasarana PPLH	6 Lokasi
	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di DAS Citarum	50 Perusahaan
Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang di tangani oleh PPNS LHK secara Profesional	Kasus pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21 (Berkas perkara di nyatakan lengkap)	122 Kasus P-21
	Penyelesaian Kasus Pidana LHK di DAS Citarum	3 Kasus P-21
	Penyediaan Sarana Prasarana PPNS	6 Lokasi

## BAB III

### PENUTUP

Tercapainya sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan apabila mendapatkan kontribusi penuh dari unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutana. Oleh karena itu, rencana aksi ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutana serta semua pemangku kepentingan dalam upaya penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan akibat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana aksi ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pengembangan program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka terhadap rencana aksi ini dapat dilakukan penyesuaian.

Dengan disusunnya rencana aksi ini dapat mendorong penyelenggaraan program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik- baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat diharapkan agar tujuan program maupun kementerian secara menyeluruh dapat tercapai.

TABEL 1 PROGNOSES CAPAIAN PROGRAM PER TRIWULAN DITJEN GAKKUM KLHK TA 2019

No	Indikator Kinerja Program	Prognosis Capaian Target Per Triwulan						
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	LOCUS
1	Ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	130	325	488	650	650	Izin	34 Provinsi
2	Penyelesaian kasus sampai P21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan peredaran ilegal TSL	25	63	88	125	125	Kasus P-21	34 Provinsi
3	Kawasan Hutan (termasuk Kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan	535.000	1.337.000	1.872.000	2.675.000	2.675.000	Hektar	34 Provinsi

TW I – Triwulan I dengan sasaran 20% dari Total Target tahun berjalan dapat terpenuhi

TW II – Triwulan II dengan sasaran 50% dari Total Target tahun berjalan dapat terpenuhi

TW III – Triwulan III dengan sasaran 70% dari Total target tahun berjalan dapat terpenuhi

TW IV – Triwulan IV dengan seluruh Target telah terpenuhi;



TABEL 2 PROGNOISIS CAPAIAN PROGRAM PER BULAN DITJEN GAKKUM KLHK TA 2019

No	Indikator Kinerja Program	Prognosis Capaian Target Per Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
1	Ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	24	60	65	65	20	76	76	65	65	60	60	24
2	Penyelesaian kasus sampai P21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan peredaran ilegal TSL	3	12	13	13	3	13	13	13	13	13	13	3
3	Kawasan Hutan (termasuk Kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan	233000	233000	233000	233000	112000	233000	233000	233000	233000	233000	233000	233000

TABEL 3 PROGNOSES CAPAIAN KEGIATAN PER BULAN DIJEN GAKKUM KLHK TA 2019;

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TARGET 2019
Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi	533.800	1.334.500	1.868.300	2.669.000	2.669.000
Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	1200	3000	4200	6000	6.000
Penyediaan Sarana Prasarana SPORC	1	3	4	6	6 Lokasi
Pendaftaran, Penyusunan Gugatan, Upaya Hukum dan Pelaksanaan Putusan Gugatan Perdata Melalui Pengadilan	1	3	4	7	7 Gugatan
Penyelesaian Sengketa LH di DAS Citarum;	0	1	2	3	3 Gugatan
Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan	4	10	14	20	20 Perkara
Pengaduan yang masuk tertangani	240	600	840	1200	1200 Pengaduan
Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	130	325	455	650	650 Izin
Penerapan Sanksi Administrasi	20	50	70	100	100 Sanksi
Penyediaan Sarana Prasarana PPLH	1	3	4	6	6 Lokasi
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di DAS Citarum	10	25	35	50	50 Perusahaan
Kasus pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21 (Berkas perkara di nyatakan lengkap)	24	61	85	122	122 Kasus P-21
Penyelesaian Kasus Pidana LHK di DAS Citarum	0	1	2	3	3 Kasus P-21
Penyediaan Sarana Prasarana PPNS	1	3	4	6	6 Lokasi



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN  
2019

---

GEDUNG MANGGALA WANABAKTI BLOK VI LT 4  
JL. GATOT SUBROTO, DKI JAKARTA